



**PROBLEMATIKA *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
(Studi Kasus Korupsi Proyek Pengadaan dan
Pemasangan *Solar Home System* (SHS))**

TESIS

TONY KUSMANA

1320922071

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2015



**PROBLEMATIKA *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
(Studi Kasus Korupsi Proyek Pengadaan dan
Pemasangan *Solar Home System* (SHS))**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**

TONY KUSMANA

1320922071

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tony Kusmana

NPM : 1320922071

Tanggal : 29 Januari 2016

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 29 Januari 2016

Yang Menyatakan,



(Tony Kusmana)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tony Kusmana
NPM : 1320922071
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PROBLEMATIKA WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Korupsi Proyek Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS))**

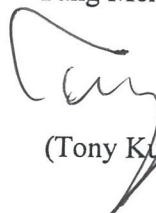
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Januari 2016

Yang Menyatakan,


(Tony Kusmana)

PENGESAHAN

Tesis Diajukan Oleh :

Nama : Tony Kusmana

NPM : 1320922071

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis : Problematika *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*
Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Studi Kasus Korupsi
Proyek Pengadaan dan Pemasangan *Solar Home System*
(SHS))

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dr. Erni Agustina, SH., Sp. N
Ketua Penguji

Dr. Dra. Hj. Laily Washkati, SH., M.Hum.
Penguji Ahli

Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum
Penguji I/Pembimbing I

Dr. Moh. Hatta, SH., M.Kn.
Penguji II/Pembimbing II



Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE., MM
Direktur

Dr. Erni Agustina, SH., Sp. N
Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Januari 2016

**PROBLEMATIKA WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE
COLLABORATOR DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
(Studi Kasus Korupsi Proyek Pengadaan
dan Pemasangan *Solar Home System* (SHS))**

Tony Kusmana

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai mengapa perlu pengaturan khusus terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* di Indonesia? bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam kasus korupsi proyek pengadaan dan pemasangan *Solar Home System* (SHS) ? Apakah perlindungan hukum tersebut sudah optimal? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada data sekunder, dengan memaparkan tentang peraturan mengenai *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Analisis data yang digunakan adalah metode analitis kualitatif. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengaturan khusus terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia sangat diperlukan, karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diharapkan menjadi pedoman pengaturan dan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*, nyatanya masih kurang memadai dan komprehensif serta masih terdapat kelemahan-kelemahan yang krusial. Urugensi pengaturan khusus terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia juga terkait masalah kelembagaan. Banyaknya lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*, akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam kasus korupsi proyek pengadaan dan pemasangan *Solar Home System* (SHS), yaitu berupa perlindungan fisik dan juga penghargaan, yaitu dengan diberikannya keringanan tuntutan hukuman dan pemberian remisi. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut belum optimal, karena masih terdapat perlindungan hukum lainnya yang semestinya berhak didapat oleh seorang *justice collaborator*, yaitu penundaan penuntutan dan pemberkasan secara terpisah, serta memperoleh keringanan pidana.

Kata Kunci: *Whistleblower*, *Justice Collaborator*, perlindungan hukum

PROBLEMATICS OF WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR IN THE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA (Case Study Corruption Procurement and Installation Project of Solar Home System (SHS))

Tony Kusmana

Abstract

This study was conducted to answer the problem of why we need special arrangements for Whistleblower and Justice Collaborator in Indonesia? How the legal protection of justice collaborator in the corruption case of procurement and the installation projects of Solar Home System (SHS)? Is that legal protection is optimal? The method used is a normative juridical with emphasis on secondary data, to explain about the rules regarding Whistleblower and Justice Collaborator. Analysis of the data used is qualitative analytical methods. Results of the study showed that the special arrangement of the whistleblower and justice collaborator in Indonesia is very necessary, because the Law No. 13 of 2006 jo Law No. 31 of 2014 on Protection of Witnesses and Victims that was expected to guide the setting and the protection of whistleblowers and justice collaborator, in fact, is still inadequate and uncomprehensive and there are still crucial weaknesses. The urgency of special arrangements for whistleblowers and justice collaborator in Indonesia is also related institutional issues. The number of institutions that can give legal protection to whistleblowers and Justice Collaborator, will give problems of its own and overlaps in the process. Legal protection of justice collaborator in the corruption case of procurement and the installation projects of Solar Home System (SHS), which is in the form of physical protection and also the award, which is given dispensation by the prosecution and remissions. However, legal protection is not optimal, because there are still other legal protection should be entitled to be obtained by a justice collaborator, that delay the prosecution and filing separately, and to obtain relief criminal.

Keywords: Whistleblower, Justice Collaborator, legal protection

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	17
I.3. Tujuan Penelitian.....	18
I.4. Manfaat Penelitian.....	18
I.5. Kerangka Teori dan Konseptual.....	18
I.5.1. Kerangka Teoritis.....	18
I.5.2. Kerangka Konseptual.....	24
I.6. Sistematika Penulisan.....	25
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 27
II.1. Pengertian Kejahatan.....	27
II.2. Pengertian Tindak Pidana.....	29
II.3. Perlindungan Hukum.....	36
II.4. Saksi dan Korban.....	38
II.5. Peran Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.....	46
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 58
III.1. Tipe Penelitian.....	58
III.2. Sifat Penelitian.....	58
III.3. Sumber Data.....	58
III.4. Metode Pengumpulan Data.....	61
III.5. Metode Analisis Data.....	62
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 64
IV.1. Urgensi Pengaturan Khusus Terhadap Whistleblower	
IV.1.1. <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	64
IV.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	82

IV.1.3.	Kelemahan Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	94
IV.1.4.	Urugensi Pengaturan Khusus Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia.....	103
IV.2.	Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Kasus Korupsi Proyek Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS).....	104
IV.2.1.	Deskripsi Kasus Korupsi Proyek Pengadaan dan Pemasangan <i>Solar Home System</i> (SHS).....	104
IV.2.2.	Dakwaan Penuntut Umum.....	111
IV.2.3.	Tuntutan Penuntut Umum.....	112
IV.2.4.	Putusan Hakim.....	115
IV.2.5.	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Kasus Korupsi Proyek Pengadaan dan Pemasangan <i>Solar Home System</i> (SHS).....	120
IV.3.	Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Kasus Korupsi Proyek Pengadaan dan Pemasangan <i>Solar Home System</i> (SHS).....	126
BAB V	PENUTUP.....	133
V.1.	Kesimpulan.....	133
V.2.	Saran.....	133
	DAFTAR PUSTAKA.....	135
	RIWAYAT HIDUP.....	143